

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satu organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand (wikipedia, 2019). ASEAN didominasi oleh mayoritas negara berkembang, sebagai negara berkembang tantangan yang dihadapi masih cukup berat, selain harus menghadapi persaingan dengan negara-negara lain, juga harus menuntaskan masalah domestik seperti korupsi, kondisi politik, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial ekonomi.

Setiap negara berkembang dalam melaksanakan pembangunannya mengharapkan pertumbuhan ekonomi positif yang disertai dengan pemerataan, sebab tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan masyarakat disuatu negara. Namun, pada kenyataannya sulit untuk menciptakan pemerataan tingkat kesejahteraan secara berkeadilan. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Dalam hal peningkatan kesejahteraan suatu negara dapat

ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita yang merupakan kriteria dalam menentukan terwujud atau tidaknya perkembangan ekonomi (Sukirno, 1985).

Tabel 1.1 GDP ASEAN

Negara	2012	2013	2014	2015
Indonesia	917,869,910,105. 7	912,524,136,718. 0	890,814,755,233. 2	860,854,235,065. 1
Malaysia	314,443,149,443. 1	323,277,158,907. 0	338,061,963,396. 4	301,354,756,113. 2
Singapore	295,087,220,933. 0	307,576,360,585. 0	314,851,156,183. 4	308,004,146,057. 6
Thailand	397,558,094,269. 9	420,333,333,333. 3	407,339,361,695. 6	401,295,970,240. 3
Philippines	250,092,092,998. 1	271,836,123,723. 7	284,584,522,898. 9	292,774,099,013. 7

Sumber: data wordbank

Berdasarkan data tersebut menjelaskan pertumbuhan GDP perkapita 5 negara ASEAN pada tahun 2012-2015, dimana pertumbuhan GDP perkapita digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara. Besaran GDP menggunakan besaran pendapatan masyarakat dengan satuan milyaran dollar. Perbedaan besaran yang diterima oleh masing-masing dari kelima negara tersebut terlihat sangat jelas. Ekonomi Indonesia berbeda dengan ekonomi Malaysia, Singapura, Thailand karena jika dibandingkan dari luas negara sangat berbeda. Sebagian besar negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas dengan jumlah penduduk yang tidak banyak. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami keterbatasan, sebab dalam hal perekonomian tidak saja dipengaruhi oleh beberapa hal yang sering dibicarakan seperti investasi, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, namun kenyataannya banyak variable lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional seperti variabel politik korupsi juga menjadi tolak ukur untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Saat ini korupsi masih menjadi isu hangat global yang tidak pernah habis untuk dibahas dan diperdebatkan. Korupsi memang bukan suatu hal yang baru mengingat korupsi adalah masalah yang sudah lama ada di berbagai negara baik negara berkembang ataupun negara maju. Korupsi telah banyak menimbulkan kerugian di berbagai sektor, dimana dampak dari korupsi dapat mengacaukan perekonomian dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Disisi lain korupsi juga dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat melemahkan pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

Negara-negara anggota ASEAN yang tergolong negara belum maju atau negara terbelakang diantaranya Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam (Gustina, 2016). Lemahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat kesenjangan ekonomi. Selain itu faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi di Negara tersebut diantaranya adalah korupsi.

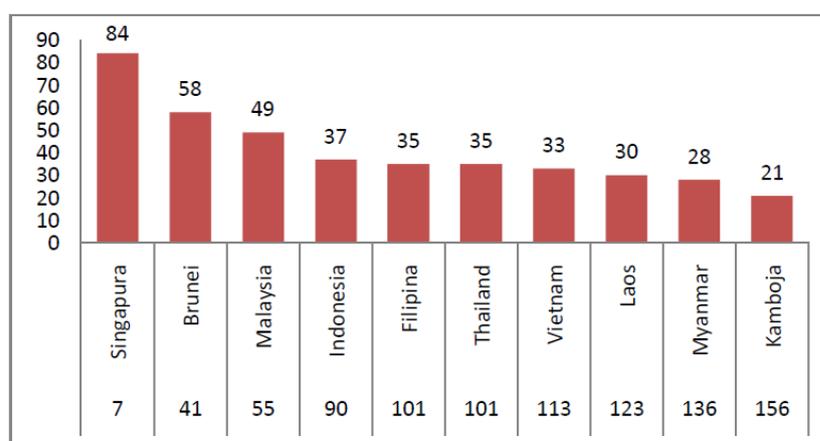
Angka korupsi di negara-negara terbelakang di ASEAN masih tergolong sangat besar, di Myanmar pada tahun 2014 angka korupsi hampir

mencapai 50%. Negara yang dikenal dengan nama Burma ini berada di bawah kekuasaan militer yang korup selama berpuluh tahun, Myanmar yang kini berada di bawah pemerintahan sipil masih kesulitan menanggulangi maraknya korupsi. Sebanyak 60% perusahaan, baik lokal maupun internasional, mengaku harus menyuap buat mendapatkan izin (reuters, 2015).

Bank dunia (2008) memperkirakan bahwa lebih dari US\$10 milyar atau sekitar 5% dari GDP dunia setiap tahun hilang dikarenakan korupsi. Berdasarkan laporan *Corruption Perception Index* dari Transparency International (2015) menyatakan bahwa “*Not one single country, anywhere in the world, is corruption-free*” yang berarti tidak ada satupun negara yang memang benar-benar bebas dari tindakan korupsi.

Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyebutkan adanya korelasi antara tingkat korupsi yang tinggi dengan kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak. Dalam Fiscal Monitor yang diterbitkan pekan ini, IMF telah menganalisis lebih dari 180 negara dan menemukan bahwa umumnya negara-negara korup memiliki kemampuan mengumpulkan pajak yang lebih sedikit. Penyebab kurang optimalnya pengumpulan pajak ini di antaranya menjalarnya praktik suap, misalnya dilakukan wajib pajak (WP) sebagai cara untuk menghindari dari kewajiban perpajakan atau memanfaatkan celah pajak yang dirancang untuk mendapatkan imbalan atau *kickbacks*. “Juga, ketika pembayar pajak percaya pemerintah mereka korup, mereka lebih cenderung menghindari membayar pajak,” tulis IMF dalam *Chart of The Week: Corruption and Your Money* yang dikutip *Bisnis*, Rabu (29/5/2019).

IMF menekankan praktik korupsi yang berlangsung di beberapa sektor telah merusak kemampuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi, dari hasil kajian tersebut, mereka menyebutkan negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah mampu mengumpulkan penerimaan pajak lebih dari 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dibandingkan negara-negara dengan level yang sama tetapi tingkat korupsinya lebih tinggi.



Sumber : *Transparency International*

Grafik 1.1 Indeks Persepsi Korupsi ASEAN 2016

Data tersebut menjelaskan tentang indeks persepsi korupsi dan peringkat negara-negara ASEAN dari seluruh negara di dunia. Indeks persepsi korupsi digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat korupsi di suatu negara dengan menggunakan skala 0 hingga 100, dimana nilai 0 menunjukkan bahwa negara tersebut sangat korup dan nilai 100 menunjukkan negara tersebut sangat bersih.

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa Singapura berada di peringkat 7 dunia dengan indeks persepsi korupsi 84 dan merupakan negara yang memiliki peringkat indeks persepsi korupsi tertinggi di ASEAN pada tahun

2016. Brunei Darussalam berada diperingkat 41 dunia dan peringkat 2 di ASEAN dengan indeks persepsi korupsi 58. Malaysia dan Indonesia dengan indeks persepsi korupsi 49 dan 36 yang berada di peringkat 55 dan 90 dunia serta peringkat 3 dan 4 di ASEAN. Selanjutnya Filipina, Thailand, Vietnam dan Laos dengan peringkat masing-masing 101, 101, 113 dan 123. Dan Myanmar dan Kamboja yang berada di peringkat 136 dan 156 dan merupakan negara yang memiliki indeks persepsi korupsi terendah dibanding negara-negara lainnya di ASEAN.

Tabel 1.2 Indeks Persepsi Korupsi 2012-2016

Negara	Indeks Persepsi Korupsi					Rata-Rata
	2012	2013	2014	2015	2016	
Indonesia	32	32	34	36	37	34.2
Malaysia	49	50	52	50	49	50
Filipina	34	36	38	35	35	35.6
Thailand	37	35	38	38	35	36.6
Vietnam	31	31	31	31	33	31.4

Sumber : Transparency International

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 negara tersebut memiliki indeks persepsi korupsi yang berfluktuasi dan berbeda-beda dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Indeks persepsi korupsi tertinggi dimiliki oleh Malaysia dengan rata-rata indeks sebesar 50, yang menunjukkan bahwa kasus korupsi di Malaysia lebih rendah dari negara-negara lainya dan mencerminkan bahwa sikap transparansi sudah berjalan cukup baik. Selanjutnya adalah Thailand dengan rata-rata indeks sebesar 36.6, lalu disusul dengan Filipina dan Indonesia dengan rata-rata indeks persepsi korupsi

sebesar 35.6 dan 34.2. Sedangkan negara yang memiliki indeks persepsi korupsi terendah adalah Vietnam dengan rata-rata indeks persepsi korupsi sebesar 31.4, yang menunjukkan bahwa di negara tersebut kasus korupsi masih sangat marak terjadi dan sikap transparansi masih belum berjalan baik.

Selain itu, pengeluaran pemerintah juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang pemerintah menentukan jumlah barang pemerintah yang akan disediakan melalui anggaran belanja negara (APBN), dan ini akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Komponen pengeluaran pemerintah harus mampu mendorong tumbuhnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.3 Pengeluaran Pemerintah ASEAN 2012-2016

Country Name	2012	2013	2014	2015
Indonesia	796848275918420	908574301386380	996197442903830	1123749877140690
Singapore	33,346,100,000	38,166,700,000	39,230,000,000	43,657,300,000
Malaysia	134442000000	139707000000	147475000000	152338000000
Thailand	2020794000000	2113370000000	2238086000000	2352615000000
Philippines	1145140000000	1250813578400	1334267479800	1455783068700

Sumber: Wordbank

Jika dilihat dari table 5 negara ASEAN diatas, sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 kelima negara tersebut mengalami fluktuasi dalam waktu 4 tahun terakhir. Dapat dilihat mayoritas negara mengalami peningkatan pengeluaran pemerintah dari setiap tahunnya, hal ini menandakan bahwa tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing negara sangat besar demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

Sehingga dapat disimpulkan berfluktuasinya besaran pengeluaran pemerintah memberikan penjelasan bahwa, peran pemerintah mengalami peningkatan dalam melakukan pembangunan ekonomi untuk menopang tingkat pertumbuhan ekonomi negara dikawasan ASEAN tersebut.

Disisi lain pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah, artinya peningkatan besaran pungutan pajak akan meningkatkan sumber pendapatan pemerintah, pendapatan tersebut untuk menutupi besaran pengeluaran atau biaya operasional pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang layak dan merata secara kesejahteraan, dengan kata lain bahwa besarnya penerimaan negara akan mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran yang produktif untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Tabel 1.4
Penerimaan Pajak ASEAN 2012-2016

Negara	2012	2013	2014	2015
Indonesia	11.38058994	11.28530146	10.83552375	10.75348778
Malaysia	15.61314674	15.31023528	14.84079071	14.28046125
Philippines	12.88795126	13.3095109	13.60544233	13.62760378
Singapore	13.78687528	13.40734038	13.70066297	13.30856576
Thailand	15.44094067	17.01195985	15.80834265	16.12420107

Sumber: Wordbank

Penerimaan pemerintah terbesar berasal dari sektor pajak. Pajak suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak yang didapat juga mengalami fluktuasi, ada beberapa negara yang mengalami tren menurun dan ada beberapa negara yang mengalami tren meningkat. Malaysia dan Indonesia menjadi negara yang memiliki tren menurun dan philipina dan singapore yang mengalami tren meningkat dalam hal penerimaan pajak, sedangkan Thailand berfluktuasi pada setiap tahunnya.

Peningkatan pungutan pajak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai konsumsi, investasi, dan net ekspor berada dalam posisi yang minimal tetap. Semakin tinggi Pajak akan menurunkan tingkat konsumsi, dilain sisi bahwa pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Karena

nilai uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga maupun masyarakat untuk pajak adalah sama dengan pendapatan pemerintah dari pajak, maka nilai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak paling besar sama atau paling kecil dari nilai pajak tersebut.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain:

Penelitian Mauro (1997) menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi antara pertama, melemahkan investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. Kedua, terjadinya *talent miss allocated*. Artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. Ketiga, Aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami misalokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan utang dan bantuan luar negeri. Keempat, melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kuantitas dan kualitas).

Tanzi dan Davodi (1997) menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat korupsi akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Gupta (1998) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi, dan bukan karena disebabkan oleh bias simultan. Penelitian Gupta (1998) menghilangkan ukuran-ukuran kemiskinan dalam pembangunan, karena keterbatasan data penelitian.

Swaleheen dan Stansel (2007) di dalam penelitiannya yang berjudul “*Economic Freedom, Corruption and Growth*”, mengestimasi 60 negara dengan menggunakan metode panel data. Hasil yang didapat oleh Swaleheen adalah bahwa korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ketika pelaku ekonomi memiliki pilihan yang sedikit (kebebasan ekonomi yang rendah). Tetapi jika orang menghadapi banyak pilihan atau kebebasan ekonomi tinggi, korupsi membantu pertumbuhan dengan menyediakan jalan di sekitar kontrol pemerintah.

Sebagaimana uraian dari penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan korupsi menjadi dua sisi yang bernilai ganda, pendapat pertama menyatakan korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendapat kedua menyatakan korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dalam penelitian ini dibutuhkan bukti empiris yang baru terkait dengan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, selain itu peneliti merasa bahwa penelitian tentang indeks persepsi korupsi, pengeluaran pemerintah, dan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi masih sedikit khususnya diwilayah ASEAN.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-5 pada tahun 2009-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN, yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan politik untuk melakukan korupsi, memiliki dampak atas menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memicu memburuknya iklim investasi dan wajib pajak sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.
2. Pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan oleh setiap negara. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi bisa menjadi indikator sebuah negara mengenai keberhasilan dalam membangun negaranya.
3. Masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu selama periode penelitian, karena pendapat positif dan negatif antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi,
4. Besarnya beban pengeluaran pemerintah pada setiap tahunnya belum mampu secara maksimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.
5. Masih terbatasnya penelitian terkait dengan **Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Penerimaan Pajak, terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-5 Pada Tahun 2009 – 2018.**

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan, pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan yang begitu luas dan kompleks. Berhubung keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Periode pengamatan selama 10 tahun, yaitu tahun 2009-2018;
2. Variabel independen yang diuji yaitu Indeks persepsi korupsi, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi.
3. Negara ASEAN yang diteliti adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina disebut dengan ASEAN-5.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat peneliti rumuskan permasalahan berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Indeks Persepsi Korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 pada tahun 2009-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 pada tahun 2009-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN-5 pada tahun 2009-2018?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru mengenai masalah korupsi dan variable-variabel yang dinilai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi Negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dapat diberikan sebagai berikut:

a) Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan, serta mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

b) Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini nantinya akan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya untuk dikembangkan lagi mengenai tentang pengaruh indeks persepsi korupsi, pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN.

c) Pemerintah

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, postur pengeluaran pemerintah dan menyusun target penerimaan sektor pajak, serta

optimalisasi pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan *Clean Government* dengan melibatkan faktor-faktor yang dinilai mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

d) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan baru bagi masyarakat mengenai factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

